

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA SUBBAGIAN
PERHUBUNGAN, KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI, PARIWISATA, DAN BAGIAN KETAHANAN
PANGAN, PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Hesty Dyanita Safitri
8105097402**



**Laporan Praktik Kerja Lapangan ini Ditulis untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2013**

ABSTRAK

Hesty Dyanita Safitiri. 8105097402. LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA SUB BAGIAN PERHUBUNGAN, KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI, DAN PARIWISATA, DAN BAGIAN KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN, DAN KETAHANAN PANGAN, LINGKUNGAN HIDUP. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Desember 2012.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan 25 Juli 2012 di Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pusat, yang bergerak di bidang pelayanan mengenai perekonomian di DKI Jakarta. Beralamat, di Balaikota Blok G Lt. 12, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9 Jakarta Pusat 10110.

Laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan serta berusaha untuk membentuk dan melatih lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) agar memiliki kompetensi yang baik dan sesuai dengan SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi. Selain itu kegunaan laporan PKL ini juga untuk mengetahui seberapa besar materi yang dipelajari di bangku perkuliahan dapat diterapkan di dunia kerja. Laporan PKL ini menggunakan metode pengumpulan data diantaranya melalui pengamatan langsung, studi kepustakaan dan browser di alamat email perusahaan resmi tempat Praktikan melakukan PKL.

Selama PKL, Praktikan di tempatkan pada Bagian Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Perhubungan. Bidang Kerja yang Praktikan lakukan dalam pekerjaan adalah Manajemen Kearsipan dan Teknologi Perkantoran. Melakukan proses penanganan surat masuk dan penggunaan mesin – mesin perkantoran.

Selama melakukan PKL, terdapat beberapa kendala yang dihadapi praktikan dalam melakukan pekerjaan, tetapi Praktikan mencoba mengatasi kendala – kendala yang tersebut agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Kendala yang pertama kurangnya variasi pekerjaan selama melakukan PKL di sana. Kendala yang kedua adalah kurangnya fasilitas yang memadai seperti jumlah unit mesin fotokopi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Manusia dari sejak lahir sampai dewasa mengalami perkembangan dan pengalaman yang mereka rasakan. Dimulai dari masa kecil, masa-masa menuntut ilmu di sekolah dan akhirnya memasuki dunia kerja setelah menginjak kedewasaan. Dunia kerja yang dialami oleh setiap manusia harus dihadapi dengan memiliki beberapa keterampilan bekerja.

Banyak sekali persiapan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk memasuki dunia kerja baik dari segi fisik maupun psikis. Seseorang yang ingin memasuki dunia kerja harus siap menghadapi tantangan. Jadi, persiapan sebelum memasuki dunia kerja, salah satunya adalah menuntut ilmu di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan agar seseorang memiliki harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Para sarjana kuliah bertahun-tahun belajar di kelas namun pada kenyataannya dunia kerja berbeda dunia perkuliahan yang didapatkannya, mungkin teori yang diterimanya kurang lebih 4 tahunan hanya berfungsi 10-20 % di dunia kerja kecuali seorang sarjana terjun di dunia akademisi. Sedangkan saat ini dunia bisnis membutuhkan pekerja yang memiliki

experience dan kemampuan di bidang kerja sehingga perusahaan lebih banyak mencari pekerja yang memiliki pengalaman sehingga tidak terlalu sulit untuk perusahaan membimbing pekerja barunya di dunia kerja.

Salah satu untuk meningkatkan wawasan dan ketrampilan mahasiswa adalah dengan cara memberikan program pelatihan secara langsung. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) khususnya Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran merupakan salah satu yang menerapkan program PKL. Bidang Administrasi Perkantoran memiliki bidang kerja yang sangat luas ruang lingkupnya.

Penerapan Program PKL di Program Studi Administrasi Perkantoran ini dilakukan untuk membekali mahasiswa dalam mengatasi dan menghadapi permasalahan yang timbul tersebut. Selain itu juga, agar mahasiswa dapat dapat menambah wawasan dan ketrampilan di bidang administrasi perkantoran. Hal ini dilakukan agar setelah lulus nanti, mahasiswa yang memasuki dunia kerja dapat mengatasi masalah yang berhubungan dengan administrasi perkantoran.

Kantor Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu instansi pemerintah yang bekerja di bidang pelayanan. Instansi ini tentunya banyak mengurus pekerjaan yang

berhubungan dengan bidang administrasi perkantoran. Oleh karena itu, instansi ini dipilih oleh Prakerin untuk melaksanakan PKL.

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

UNJ mengadakan kegiatan PKL tentu memiliki maksud dan tujuan yang baik dan berguna bagi pihak-pihak terkait, baik bagi mahasiswa sebagai pelaksana pihak yang PKL dan UNJ sebagai pihak yang mencantumkan PKL dalam kurikulum perkuliahan serta kantor Biro Perekonomian sebagai instansi dilaksanakannya PKL. Maksud dilaksanakannya PKL oleh UNJ, antara lain :

- 1.

BAB II

TINJAUAN UMUM BIRO PEREKONOMIAN PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI DKI JAKARTA

A. Sejarah Instansi

Ada tujuh tahapan hingga bentuk pemerintah daerah. Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya Undang – Undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum.

1. Periode I (1945-1948)

Pada periode ini belum terdapat sebuah UU yang mengatur Pemerintah Daerah secara khusus. Aturan yang digunakan adalah aturan yang ditetapkan oleh PPKI. Selain itu digunakan pula aturan UU No 1 tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. PPKI dalam rapatnya pada 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian daerah dan pelaksanaan pemerintahan secara umum dengan melanjutkan pelaksanaan yang sudah ada.

2. Periode II ((1948-1957)

Pada periode ini berlaku Undang-Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini adalah UU pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan

pemerintahan daerah di Indonesia. Secara umum Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Daerah otonom khusus yang diberi nomenklatur “Daerah Istimewa” adalah daerah kerajaan/kesultanan dengan kedudukan *zelfbesturende landschappen/kooti*/daerah swapraja yang telah ada sebelum Indonesia merdeka dan masih dikuasai oleh dinasti pemerintahannya.

3. Periode III (1957-1965)

Pada periode ini berlaku UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang disebut juga Undang – undang tentang pokok pemerintahan 1956. UU ini menggantikan UU RI No. 22 Tahun 1948 dan UU NIT No. 44 Tahun 1950. Secara umum Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi yaitu daerah otonom biasa yang disebut daerah swatantra dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa.

4. Periode IV (1965-1974)

Pada periode ini berlaku UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan UU No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959; Penetapan

Presiden No. 5 Tahun 1960 dan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1965. Menurut UU ini secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah.

5. Periode V (1974-1999)

Pada periode ini berlaku UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. UU ini menggantikan UU No. 18 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat diterapkan. Menurut UU ini secara umum Indonesia dibagi menjadi satu macam Daerah Otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan Wilayah Administratif sebagai pelaksana asas dekonsentrasi.

6. Periode VI (1999-2004)

Pada periode ini berlaku UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada tiga daerah yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta dan satu tingkat wilayah administratif.

7. Periode VII (mulai 2004)

Pada periode ini berlaku UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu Negara mengakui kekhususan dan/atau keistimewaan yang ada pada empat daerah yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

“JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah :

1. Jakarta yang nyaman, bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan damai.
2. Jakarta yang sejahtera, bermakna terwujudnya derajat kehidupan penduduk Jakarta yang sehat, layak dan manusiawi.

MISI

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka formulasi misi yang digagaskan adalah:

1. Membangun tata Pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah “Good Governance”.
2. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima.
3. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.
4. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
5. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.

Biro Perekonomian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha

perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi.

2. Fungsi :

1. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biro perekonomian;
2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal, dan promosi;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal, dan promosi;
4. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal, dan promosi;

5. Pembinaan pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal, dan promosi;

B. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi Biro Perekonomian Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Biro Perekonomian Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Ir. Adi Ariantara, MM. Biro instansi ini memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tugas dari seorang Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebijakan usaha perhubungan, kepariwisataan, kebudayaan, energi, dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, kelautan, pertanian, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi.

b. Kepala Bagian Perhubungan, Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Dikepalai oleh Ir. H. Hindradman Dewantoro, MM. Merupakan salah satu pelaksana bagian yang merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan, pariwisata, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Di bagian ini memiliki 3 sub bagian, yaitu:

- a) Kepala Subbagian Perhubungan. Dikepalai oleh Drs. Rustam Sitinjak. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan hal-hal yang menyangkut di bidang perhubungan.
- b) Kepala Subbagian Pariwisata. Dikepalai oleh Gatot Sucipto, SE. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan hal-hal yang menyangkut di bidang pariwisata dan kebudayaan di provinsi DKI Jakarta.
- c) Kepala Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dikepalai oleh Anasril Kambut, SE, MM. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, membina dan

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan hal-hal yang menyangkut di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

c. Kepala bagian Penanaman Modal dan Promosi dan BUMD

Merupakan salah satu pelaksana bagian yang merumuskan kebijakan, serta mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, promosi dan badan usaha milik daerah. Di bagian ini memiliki 3 subbagian, yaitu:

- a) Kepala Subbagian Penanaman Modal dan Promosi
- b) Kepala Subbagian Usaha Daerah
- c) Kepala Subbagian Tata Usaha

d. Kepala Bagian Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dikepalai oleh Pujiono, SH. Merupakan salah satu pelaksana bagian yang merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan.

Dibagian ini memiliki 3 Subbagian, yaitu:

- a) Kepala Subbagian Kelautan. Dikepalai oleh Drs. Rizal Effendi,. MM.

Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan hal-hal yang menyangkut di bidang kelautan.

b) Kepala Subbagian Pertanian dan Kehutanan. Dikepalai oleh Marlina Widya Dewi SE, M.Kes. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan hal-hal yang menyangkut di bidang pertanian dan kehutanan.

c) Kepala Subbagian Ketahanan Pangan. Dikepalai oleh Achmad Chudhoiri, SE, MM. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang menyangkut di bidang ketahanan pangan.

e. Kepala Bagian Koperasi, Usaha Kecil, Mikro Kecil dan Menengah, Industri, Energi dan Perdagangan

Merupakan salah satu pelaksana bagian yang merumuskan kebijakan serta mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan koperasi, usaha kecil, mikro kecil dan menengah, industry, energi dan perdagangan.

Bagian ini memiliki 3 subbagian, yaitu:

a) Kepala Subbagian Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

b) Kepala Subbagian Industri dan Energi

c) Kepala Subbagian Perdagangan dan Perpasaran

C. Kegiatan Umum Perusahaan

Kegiatan umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan (kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan) dan urusan pemerintahan lainnya yang diatur dalam UU 29/2007. Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang:

1. Tata Ruang, Sumber Daya Alam, Dan Lingkungan Hidup
2. Pengendalian Penduduk Dan Permukiman
3. Transportasi
4. Industri Dan Perdagangan
5. Pariwisata